

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT**

**( Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANNASIA SOPHIA DEWI**

**C2C009140**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2013**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Annasia Sophia Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009140

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **“FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI  
E-GOVERNMENT ( Studi Pada Pemerintah  
Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia )**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Haryanto, SE., M.Si, Akt

Semarang, 4 September 2013

Dosen Pembimbing

( Dr. H. Haryanto, SE., M.Si, Akt. )

NIP. 197412222000121001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Annasia Sophia Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009140

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **“FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI  
E-GOVERNMENT ( Studi Pada Pemerintah  
Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia )**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 September 2013

Tim Penguji:

1. Dr. H. Haryanto, SE., M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. Hj. Indira Januarti, M.Si, Akt. (.....)
3. Drs. Dul Muid, M.Si, Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Annasia Sophia Dewi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ( Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 September 2013

Yang Membuat Pernyataan,

(Annasia Sophia Dewi)

NIM : C2C009140

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaporan keuangan daerah melalui E-Government. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah utang (DSCR), jumlah anggota dewan, PDRB perkapita, tingkat pendidikan masyarakat, populasi masyarakat, dan pendapatan asli daerah.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu e-government pada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Sampel terbagi dalam 2 kelompok, yaitu provinsi yang melaporkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui e-government dan yang tidak melaporkan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utang (DSCR), Jumlah Anggota Dewan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap implementasi e-government. Sedangkan faktor-faktor lain yaitu PDRB perkapita, tingkat pendidikan masyarakat, dan populasi masyarakat tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi e-government

**Kata Kunci :** E-Government, pelaporan keuangan daerah, pengungkapan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## *ABSTRACT*

*This research aims to analyze the factors that affect the successes implementation of public financial disclosure through e-government. Factors tested in this research are debt (DSCR), the number of councillors, GDP per capita, citizen education level, population, and region own source revenue.*

*Sample in this research were selected using purposive sampling method, that is e-government on 33 provinces in Indonesia. The samples are divided into two categories, provinces reporting the transparency of financial management through e-government and provinces not reporting. Statistical methods used in this study is the logistic regression at a significance level 5%.*

*Result of this research indicate that the factor debt (DSCR), the number of councillors, and region own source revenue significantly influence the implementation of e-government. While other factors, GDP per capita, citizen education level, and population not indicate any significant effect on the implementation of e-government.*

*Keyword : E-Government, public financial reporting, public financial disclosure, transparency of public financial management*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Gapailah apa yang kamu inginkan sampai titik darah penghabisan”**

*“Selama punya nafas, tak ada alasan untuk menyerah”*

**“I’ll feel better if i get active”**

*“I don’t stop when I’m tired, I stop when I’m done”*

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- *Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya*
- *Bapak, Ibu yang sangat kucintai dan kakak-kakakku tercinta*
- *Sahabat-sahabat tersayang, saudara, dan teman-teman yang ada dalam hidupku*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr.wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ( Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia) dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, motivasi, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. H. Haryanto, SE., M.Si, Akt. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, saran, serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, saran dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan bagian Tata Usaha yang telah banyak membantu dalam berbagai proses yang diperlukan.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Anwar dan Ibu Hj. Samsiatun yang senantiasa memberikan cinta tanpa batas, kasih sayang, doa tiada henti, semangat, kesabaran, ilmu hidup, ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan selama ini.
8. Kakak-kakak tersayang, Dokter Amalia Andansari Dewi dan Annur Anata Dewi S.IP, yang telah memberikan semangat, nasihat, ceramah serta canda tawa didalam hangatnya keluarga.
9. Aditya Tri Nugraha, yang telah memberikan semangat, inspirasi dan motivasi yang luar biasa bagi penulis dalam menapaki perjalanan menuju cita-cita masa depan.
10. Sahabat-sahabat geng absurd “Group For Nothing (G4N)” Yuko, Festi, Kiki, Kemin, Pinto, Zimbe, Faizal, Gogon, Alex yang selalu menemani dan memberikan canda tawa absurdnya dikala suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat “geng cantik” di Banjarnegara , Poppy, Paramitha, Italiana, Ayie, Yayie yang selalu memberikan pelajaran hidup yang “berbeda” serta untuk persahabatan yang kekal sedari dulu hingga sekarang.
12. Teman-teman penulis : Tyasilv, Normala Dewi, Khildatur, Riyantini, Gea, Caca, Tantra, Nia, Eri, mas Donny, mba Rini.
13. Sahabat dan teman KKN Desa Plajan, Jepara , Tahun 2012 : Ika Pratama, Tete Nisa, Lili, Beta, Beni, Aa’ Hayat, Mulkan , Ode, Bagus, Adel, Imel dan Agung. Terima kasih

telah menjadi keluarga yang baik dan menyenangkan selama menjalani KKN hingga saat ini.

14. Qaqa Adiatma yang baik hati dan selalu membantu tiap aku mengalami kesulitan dan setia menemani menggalau.
15. Orang-orang spesial yang pernah singgah dihidupku dan memberikan pelajaran hidup yang begitu berharga.
16. Anak-anak kost “Samani”, kost “C n C”, warga Perumahan Villa Tembalang, dan kost terlama ku tinggal yaitu Kost “Graha Krismar” yang telah memberikanku pengalaman berharga selama hidup dikostan selama merantau di Semarang.
17. Teman-teman organisasi di kampus, Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yaitu Caesar, Mba Rini, Mas Ismail, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman berorganisasi, kesempatan belajar kepemimpinan dan teamwork yang pastinya sangat bermanfaat bagi penulis nantinya.
18. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2009. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Semarang, 5 September 2013

Penulis

Annasia Sophia Dewi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	12
2.1.2 Implementasi. ....	14
2.1.3 E-Government. ....	17
2.1.4 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah . ....	24
2.1.5 Akuntabilitas .....	31
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	35
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	42
2.3 Hipotesis. ....	43
2.3.1 Pengaruh Utang Pemerintah Daerah.....	43
2.3.2 Pengaruh Kompetisi Politik. ....	44
2.3.3 Pengaruh Pendapatan Regional Perkapita. ....	45
2.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	46
2.3.5 Pengaruh Populasi Masyarakat. ....	48
2.3.6 Pengaruh Tekanan Fiskal. ....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>52</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	52
3.1.1 Variabel Dependen. ....	52
3.1.2 Variabel Independen. ....	53
3.2 Populasi dan Sampel. ....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data. ....	58

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	59
3.5 Metode Analisis. ....	59
3.5.1 Regresi Logistik .....	59
3.5.2 Statistik Deskriptif.....	60
3.5.3 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit test.....	61
3.5.4 Uji Wald.....	61
3.5.5 Koefisien Determinasi .....	61
3.5.6 Ketepatan Model .....	61
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS. ....	 63
4.1 Deskripsi Objek Penelitian. ....	63
4.2 Regresi Logistik. ....	65
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	65
4.2.2 Tabel Frekwensi E-Government Yes Or No.....	71
4.2.3 Hosmer and Lemeshow’s Test. ....	84
4.2.4 Uji Wald.....	85
4.2.5 Koefisien Determinasi. ....	87
4.2.6 Ketepatan Model. ....	89
4.3 Interpretasi Hasil. ....	73
4.3.1 Utang (DSCR) terhadap implementasi e-government.....	90
4.3.2 Jumlah Anggota Dewan terhadap implementasi e-government.....	93

4.3.3 PDRB terhadap implementasi e-government.....	95
4.3.4 APS terhadap implementasi e-government.....	98
4.3.5 Populasi terhadap implementasi e-government.....	101
4.3.6 PAD terhadap implementasi e-government. ....	104
<b>BAB V PENUTUP.</b> ....	<b>107</b>
5.1 Simpulan.....	107
5.2 Keterbatasan.....	109
5.3 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b> ....	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b> .....	<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 : Provinsi yang melaporkan e-government dan tidak.....	64
Tabel 4.2 : Statistik Deskriptif Provinsi yang tidak menerapkan E-Government	65
Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif Provinsi yang menerapkan E-Government.....	65
Tabel 4.4 : Tabel Frekwensi E-Government Yes Or No.....	72
Tabel 4.5 : Uji Kelayakan Model Hosmer and Lemeshow's Test.....	85
Tabel 4.6 : Hasil Uji Wald .....	86
Tabel 4.7 : Koefisien Determinasi .....	88
Tabel 4.8 : Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	88
Tabel 4.9 : Ketepatan Model .....	89

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema E-Government .....	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Daftar 33 Provinsi di Indonesia .....	118
Lampiran B : Daftar provinsi yang melaporkan transparansi dan tidak .....	120
Lampiran C : Daftar Debt Service Coverage Ratio (DSCR) .....	122
Lampiran D : Daftar Jumlah Anggota Dewan.....	124
Lampiran E : Daftar Produk Domestik Regional Bruto.....	125
Lampiran F : Daftar Angka Partisipasi Sekolah.....	127
Lampiran G : Daftar Populasi Masyarakat.....	129
Lampiran H : Daftar Pendapatan Asli Daerah.....	131
Lampiran I : Output SPSS.....	133
Lampiran J : E-Government Yes Or No .....	142



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang saat ini masih terhitung sebagai negara berkembang tengah berupaya untuk terus meningkatkan perekonomiannya dengan harapan keluar dari status negara berkembang dan menjadi suatu negara yang maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat (Haryanto dan Sahmuddin, 2008)

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Widjaja, 2002). Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002)

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat. Dewasa ini, masyarakat semakin

menyadari kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas akan informasi keuangan pemerintah. Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dan Salmuddin, 2008)

Hal tersebut juga dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat akan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD oleh pemerintah yang terkadang menimbulkan dugaan-dugaan negatif yang dapat menempatkan pemerintah pada posisi yang serba salah. Dengan demikian, demokratisasi dapat ditegakkan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, penggunaan internet semakin akrab hadir ditengah masyarakat yang haus akan segala sesuatu yang bersifat praktis dan cepat. Hal-hal yang dahulu dikerjakan secara manual serta membutuhkan waktu yang lama, kini dapat diselesaikan dengan sistem komputerisasi yang canggih dan hanya membutuhkan waktu singkat. Sistem *on-line* pun makin populer, diiringi tren *e-commerce* yang terus menerus berkembang. Tren tersebut juga berpengaruh dalam bidang pemerintahan, yaitu ditandai dengan adanya *e-government* yang sudah mulai banyak disosialisasikan di berbagai negara.

*E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*. Menurut Bastian (2003) *E-Government* dapat digolongkan kedalam 4 tingkatan, yaitu :

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui *e-mail*.
3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian *database* bersama.

Umumnya, kantor pemerintahan di Indonesia sudah merealisasikan tingkat pertama, yaitu dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui website. Serta sebagian kantor pemerintahan sudah berada pada level kedua dan ketiga, yang diantaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP).

Level terakhir dapat dicapai dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah

daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Haryanto dkk, 2007)

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Aplikasi SIPKD ini dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah kemudian diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (sumber : [www.djkd.kemendagri.go.id](http://www.djkd.kemendagri.go.id))

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

1. Wilayah I, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;
2. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;

3. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;
4. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;
5. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan. (Sumber : [www.djkd.kemendagri.go.id](http://www.djkd.kemendagri.go.id))

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagaimana yang ditetapkan pada PP no.56 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) menerangkan bahwa Informasi

Keuangan Daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup:

1. APBD dan Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantu
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan
7. Data yang terkait dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

SIPKD merupakan sistem informasi yang memuat proses penyusunan APBD sampai pada tahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan beserta pencatatan kode rekeningnya. Proses penyusunan tersebut dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di daerah beserta program dan kegiatannya, program dan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Data pra rencana kerja ini nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga rancangan tersebut disusun menjadi data APBD. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Daerah di Indonesia melalui *E-Government* diharapkan tidak dipandang hanya sebagai alat bantu atau perangkat saja, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pelayanan dan pengembangan operasional

pemerintahan. Serta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi biaya, serta bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik bagi warga negaranya, baik bagi mereka yang berstatus sebagai *citizens, client, users*, maupun *customers*. Pemerintah Daerah merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, sangat rentan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, yaitu seperti adanya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). E-government diharapkan dapat menciptakan terwujudnya *good governance* maupun *clean government* di Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal sehingga tercipta akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah di Indonesia (Bachtiar, 2011) (Sumber : [elib.unikom.ac.id](http://elib.unikom.ac.id))

Penerapan *e-government* bertujuan untuk menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Yaitu pemerintah dengan warga negara atau *Government to Citizen (G to C)*, interaksi pemerintah dengan swasta *Government to Business (G to B)*, serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah *Government to Government (G to G)* maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, namun dalam praktiknya pasti dijumpai faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem ini. (sumber : <http://chsaleh.lecture.ub.ac.id>). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan mengkaji lebih jauh lagi yang akan dituangkan ke dalam Skripsi dengan

judul : “Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Implementasi *E-Government* untuk Mencapai Akuntabilitas Publik di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah implementasi *e-government* sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi diIndonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem *E-Government* di Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang memiliki banyak faktor pendukung maupun penghambat implementasi teknologi informasi ke dalam sistem pemerintahan. Dengan memilih beberapa faktor umum dalam suatu negara yang kemungkinan berpengaruh terhadap implementasi *e-government*, maka akan diuji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi *E-Government* di tiap Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Daerah di Indonesia dapat mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat implementasi *e-Government* agar sesuai dengan tujuan diberlakukannya peraturan pemerintah perihal otonomi daerah.

2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas *e-government* agar dapat tercipta akuntabilitas publik sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan *e-government* sehingga masyarakat dapat membantu terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab, yakni BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V.

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Telaah Pustaka. Bab ini membahas mengenai Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

Bab 4 Hasil dan Analisis. Bab ini membahas Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Interpretasi dari hasil penelitian.

Bab 5 Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, dan saran.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. (Lupia and McCubbins, 2000)

Teori Keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1) *Self Interest*, adalah sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan sendiri, (2) *Bounded-rationality*, adalah sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) *risk aversion*, adalah sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian

dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen (Eisenhardt, 1989)

Adanya tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen akan menimbulkan masalah keagenan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan serta implementasi terhadap kebijakan perusahaan dan fungsi pengenalan yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo mengenai akuntabilitas tersebut mengandung arti bahwa terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Dalam Teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk

bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetri* antara pihak agen (pemerintah) dengan yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Dengan adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya korupsi atau penyelewengan yang rentan dilakukan oleh pemerintah (agen). Sebagai konsekuensinya, harus terdapat akuntabilitas atas kinerja pemerintah (agen) sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *informatin asymmetry*. (Mardiasmo, 2002)

Oleh karena itu, mengingat pentingnya akuntabilitas terhadap publik tersebut, perlu dilakukan revitalisasi *e-government* yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.

### **2.1.2 Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian implementasi dikemukakan oleh Wahab yaitu: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” ( Wahab, 2001)

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003)

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program (Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono, 2006)

### 2.1.3 E-Government

*E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Sedangkan, *The World Bank Group* mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut: “*e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (*The World Bank Group*, 2001). UNDP (*United Nation Development Programme*) juga memberikan definisi tersendiri dengan lebih singkat untuk *E-Government* : “*E-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) dari agen pemerintah.”

Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi akan *E-Government*, para ahli pun turut mendefinisikan *E-Government*. Zweers and Planque (2001) memberikan definisi : “*E-Government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”. (dalam Indrajit, 2004).

Selain lembaga-lembaga dan para ahli, dalam Indrajit (2004) tiap negara pun mendefinisikan E-Government secara beragam. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-Government* secara singkat: “*E-government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means.*” (E-government mengacu pada penyampaian informasi dan layanan online pemerintah melalui internet atau alat digital lainnya.)

Sedangkan New Zealand, yang merupakan negara kepulauan di barat daya Samudera Pasifik ini mendefinisikan : “*E-Government* adalah sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses bagi pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi.”

Kemudian Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan: *E-Government is:*

1. *online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access;*
2. *government operations for internal constituencies that simplify the operational demands of government for both agencies and employees.*

(*E-Government* adalah :

1. Layanan *online* yang menghilangkan hambatan tradisional yang menghambat warga negara dan kalangan bisnis dalam penggunaan layanan pemerintah serta menggantikan hambatan tersebut dengan akses yang mudah;

2. Operasional pemerintahan untuk konstituen internal yang menyederhanakan permintaan operasional pemerintah untuk agen dan pegawai.)

Italia secara lengkap dan detail mendefinisikan *e-government*, yaitu: “*The use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action:*

1. *Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies;*
2. *Computerization of services to citizens and firms, often implying integration among the services of different departments and agencies;*
3. *Provision of ICT access to final users of government services and information.”*

(Penggunaan *ICT* modern dalam modernisasi administrasi kami, yang terdiri dari kelas-kelas tindakan berikut:

1. Komputerisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam departemen dan lembaga individu;
2. Komputerisasi pelayanan terhadap masyarakat dan perusahaan, sering menyiratkan integrasi antara layanan departemen dan lembaga yang berbeda;
3. Penyediaan akses *ICT* untuk pengguna akhir dari layanan dan informasi pemerintah.) ( Sumber : [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Indonesia mendefinisikan *E-Government* sebagai sebuah teknologi telematika yang digunakan oleh aparat pemerintah untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Konsep *e-Government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama dilihat dari sejarahnya, yaitu:

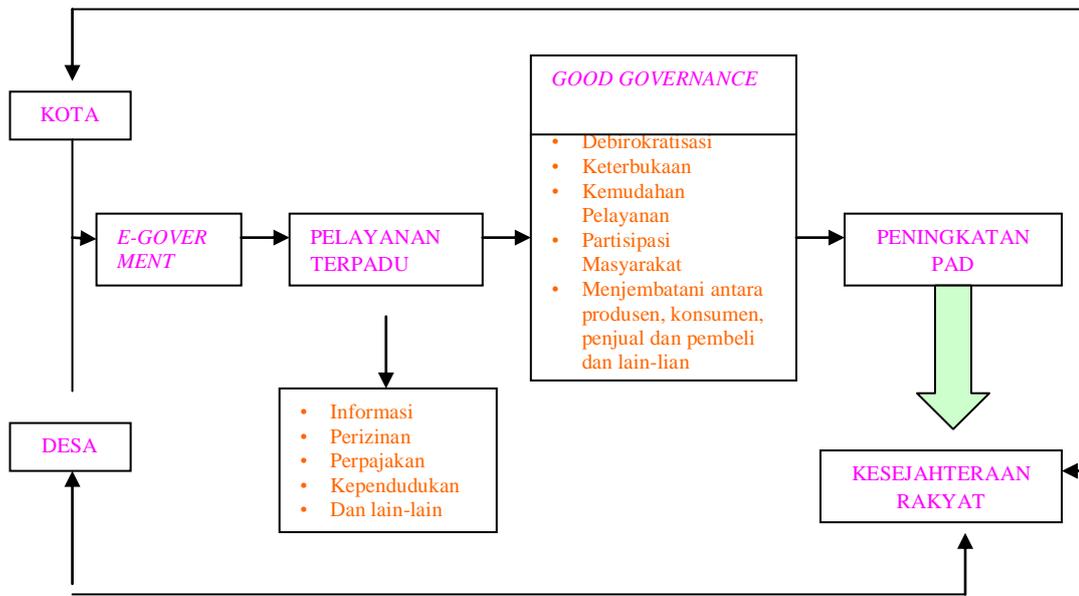
1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada

bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu (Indrajit, 2004)

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada. Secara ringkas, skema *e-Government* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Skema *e-Government*

Sumber : Anwar, Khoirul dan Asianti, 2004

Pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai tujuan :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat

kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. (Anwar, Khoirul dan Asianti, 2004) Kemudian ditinjau dari segi manfaat, *E-Government* dapat :

1. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan mencapai *Good Governance* dalam pemerintahan.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
3. Menurunkan biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari.
4. Meningkatkan kecepatan berbagai permintaan dan ketepatan pelayanan publik terhadap permintaan dan pertanyaan masyarakat.
5. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada semua tingkatan.
6. Memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun nasional.

7. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. Sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas tanpa perlu ada rasa takut dan khawatir.
9. Menciptakan lingkungan masyarakat yang tanggap menghadapi segala permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan tren global.
10. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan berbagai kebijakan publik secara demokratis. (Indrajit, 2004)

Dengan dikembangkannya *E-Government*, akses informasi pada pemerintah terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat di suatu negara, sehingga apabila diimplementasikan dengan tepat maka secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat negara tersebut. Maka dari itu, implementasinya pada tiap negara haruslah dilaksanakan sesegera mungkin, tanpa ditunda-tunda. Serta dibangun dengan kepemimpinan yang baik dan kerangka pengembangan yang holistik, sehingga memberikan keunggulan kompetitif secara nasional.

#### **2.1.4 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (*input*), pengolahan (*processing*) serta keluaran (*output*). (Scott dalam Anwar, 2004). “Sistem sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi

dengan maksud yang sama dalam mencapai tujuan akan tetapi secara umum proses yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output” (McLeod, 2007)

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan data sendiri memiliki pengertian fakta-fakta dan gambaran yang secara umum tidak dapat digunakan oleh user. (McLeod, 2007). Itu berarti data merupakan bentuk yang masih mentah, belum bisa bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah untuk menghasilkan informasi untuk penerima, kemudian digunakan untuk membuat suatu keputusan atau tindakan.

Sistem informasi merupakan suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Dari organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis. Sistem informasi merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat guna mendukung proses pengambilan keputusan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. (McLeod, 2007)

Dari sekian pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menyajikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, guna mendukung fungsi-fungsi dalam suatu organisasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas organisasi.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Haryanto dkk, 2007) . Sedangkan Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2007)

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima

sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah (Halim, 2007)

Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah meliputi:

- a. APBD dan Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- b. Neraca Daerah
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantu
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan
- g. Data yang terkait dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu aplikasi yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah,

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (Sumber : [www. Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com](http://www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com))

Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri no 59 Tahun 2007. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses intergrasi dengan sistem-sistem lain yang terkait. Fungsi utama aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu :

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban).
2. Menyusun Laporan Keuangan dengan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.

(sumber: [www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com](http://www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com))

Berdasarkan fungsi diatas, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki peranan membantu pemerintah dalam penganggaran. Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibuat secara sistematis dan terkontrol dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah dapat mengelola keuangan dengan mudah tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan terperinci dan cermat. Pertanggungjawaban yang dilakukan pun dapat dengan mudah dilakukan karena hasil dari pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem tersebut hasil yang didapat merupakan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah memudahkan pemerintah menyusun laporan keuangan tanpa memerlukan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah ini dapat menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, sehingga data-data yang ada tidak mengalami kerusakan atau pun hilang pada saat akan dipergunakan kembali. Menggunakan sistem pengelolaan

keuangan daerah dapat menyajikan informasi keuangan secara akurat dan terperinci tanpa takut akan salah dalam perhitungan laporan keuangan sehingga informasi yang dikeluarkan akurat secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri no 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi atas Permendagri sebelumnya, telah jelas diatur didalamnya tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan penggunaan SIPKD, dimana didalamnya termuat modul - modul sebagai berikut :

1. Modul Anggaran ( RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), Anggaran Kas).
2. Modul Penatausahaan (SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Standar Pelayanan Minimal) , STS (Surat Tanda Setoran), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana),SPJ (Surat Pertanggungjawaban)).
3. Modul Pembukuan (Jurnal, Saldo Awal).
4. Modul Perubahan APBD.

(sumber: [www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com](http://www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com))

Berdasarkan modul-modul diatas, SIPKD memiliki beberapa modul, modul-modul tersebut merupakan bagian dari data-data pengelolaan keuangan. Dalam SIPKD, anggaran data yang dijadikan sebagai bahan untuk diproses adalah modul anggaran dimana terdapat beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Modul penatausahaan merupakan data dari Sistem Informasi

pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk memproses tentang anggaran yang dikeluarkan sebagai bentuk penatausahaan. Modul pembukuan ini digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan jurnal dan saldo awal yang merupakan data-data yang diolah dalam SIPKD. Modul perubahan APBD digunakan sebagai data-data Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola tentang APBD suatu daerah.

Dengan diterapkannya SIPKD tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Sehingga, akan mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (sumber: [www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com](http://www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com))

### **2.1.5 Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, 2008)

*Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam *Concept Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan yaitu bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas Publik terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo, 2002, Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas 4 dimensi, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi beserta program pembangunan yang dipercayakan padanya, termasuk pelayanan BUMN/BUMD yang berada dibawah wewenangnya).

2. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan prosedur.
3. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit organisasi.
4. Akuntabilitas harus dibangun dengan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi.
5. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi.
6. Adanya tindak lanjut terhadap penilaian atas akuntabilitas (Halim, 2007)

## 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

NO	TAHUN	PENELITI	JUDUL	RANGKUMAN PENELITIAN
1	2008	Perez, et.al	e-Government process and incentives for online public financial information	<p>Jurnal penelitian yang ditulis oleh Perez, Bolivar dan Hernandez pada tahun 2008 dengan judul “<i>e-Government process and incentives for online public financial information</i>” digunakan sebagai dasar penelitian. Didalam jurnal tersebut, variabel yang menunjang keberhasilan implementasi <i>e-Government</i> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetisi Politik Anggota dewan terpilih pada pemilu terakhir untuk partai yang berkuasa/jumlah total anggota dewan.</li> <li>2. Utang Pendanaan berupa utang pada tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>3. Pemindahan dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah Transfer modal pada pendapatan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Tingkat pendidikan pada Universitas (perguruan tinggi) menurut provinsi.</li> <li>5. Populasi penduduk suatu daerah.</li> <li>6. Tekanan Fiskal</li> </ol>

				Pajak dan pendapatan non pajak, lelangt penjualan barang dan jasa dari pemerintah dalam anggaran pendapatan tahun berjalan. 7. Tingkat pengguna internet
1	2011	Fahrudin Jaya	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan <i>E-Government</i> di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fokus penelitian adalah menganalisa kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam penyelenggaraan <i>E-Government</i> . Masalah yang dikaji yaitu Kebijakan <i>E-Government</i> dan Perangkat <i>E-Government</i> di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Palopo. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kesiapan penyelenggaraan <i>E-Government</i> di instansi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi langsung dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo kurang serius dalam penyelenggaraan <i>E-Government</i> baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun SKPD. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Rencana Induk

				<p>Pengembangan <i>E-Government</i> yang dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan <i>Good Governance</i> di Kota Palopo. Namun dengan adanya Program Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan program Nasional dalam menciptakan administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi salah satu bentuk tahap penyelenggaraan <i>E-Government</i> secara nasional yang perlu mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah Kota Palopo untuk secepat mungkin menerapkan <i>E-Government</i>.</p>
2.	2011	Hilda Erwina Simatupang	<p>Penerapan <i>Electronic Government</i> dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan <i>Electronic Government</i> dalam pelayanan publik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi serta menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Informan kunci</p>

				<p>dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Distribusi Data dan Dokumen, petugas <i>Analizing Point Impor</i>, dan petugas <i>Analizing Point Expor</i>. Sedangkan yang menjadi informan utama adalah para pengusaha yang terdaftar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan <i>Electronic Government</i> dalam pelayanan publik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia dan fasilitas yang sudah memadai guna mendukung penerapan <i>e-Government</i> dalam pelayanan kepabeanan dan cukai. Penerapan <i>e-Government</i> memberikan pelayanan yang efisien, efektif, ekonomis dan transparan. Namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan baik kepada para pengusaha maupun para pegawai. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan kepada para pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi kepada para pengusaha untuk dapat berpartisipasi lagi dalam menggunakan pelayanan dengan sistem <i>online</i>.</p>
--	--	--	--	---

3.	2011	Citra Annisa	Implementasi <i>E-Government</i> melalui Bursa Kerja <i>On-Line</i> pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam pelaksanaan <i>E-Government</i> . Melalui bursa kerja <i>on-line</i> dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi. Dalam hal implementasi <i>E-Government</i> melalui Bursa Kerja <i>On-line</i> , dalam komunikasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah baik dengan pola hubungan yang bersifat langsung dan lancar, namun komunikasi antara pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih buruk, dimana masih terdapat banyak miskomunikasi, sosialisasi yang masih kurang baik. Sedangkan hambatan yang selama ini dialami dalam implementasi <i>E-Government</i> melalui bursa kerja <i>online</i> pada Kemenakertrans yang terdiri dari (1) Sosialisasi bagi masyarakat yang kurang (2) Masih dipeliharanya budaya tradisional (3) sumberdaya manusia yang kurang handal (4) Anggaran biaya yang dibutuhkan cukup besar.
4.	2010	Riva Nurul Inayah	Implementasi <i>E-Government</i> di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten	Fokus penelitian ini adalah implementasi <i>E-Government</i> di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dimana Dinas Pertambangan dan

				<p>energi merupakan sebuah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah menerapkan <i>E-Government</i>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana <i>e-government</i> di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 86 orang pegawai, sedangkan sampel yang digunakan sampel jenuh. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi <i>E-Government</i> di Dinas ini kurang maksimal. kurang maksimalnya implementasi <i>e-government</i> ini disebabkan kurangnya frekuensi pelatihan, kurangnya <i>updating</i> data dan informasi, kurangnya anggaran pengembangan <i>e-government</i>.</p>
5.	2006	Rully Ardiyan	<p>Penerapan <i>E-Government</i> Melalui Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Kota Bandung. (Studi kasus pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kota</p>	<p>Kota Bandung telah menerapkan konsep <i>e-Government</i> melalui penyelenggaraan situs web Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu media yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan situs web Pemerintah Kota</p>

			Bandung)	<p>Bandung pada kelas publikasi dan interaksi telah dilakukan, sedangkan pada kelas transaksi Pemerintah Kota Bandung belum dapat melakukannya. Pada kelas publikasi Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan berbagai data dan informasi yang dapat diakses oleh berbagai masyarakat secara bebas. Pada kelas interaksi telah disediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi melalui situs <i>web</i> ini, sejauh ini bentuk interaksi yang tersedia berupa interaksi secara tidak langsung. Penelitian ini memberikan suatu masukan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan performa situs <i>web</i> Pemerintah Kota Bandung khususnya pada kelas interaksi dengan menyediakan forum diskusi yang dapat digunakan sebagai sarana partisipasi masyarakat.</p>
--	--	--	----------	---

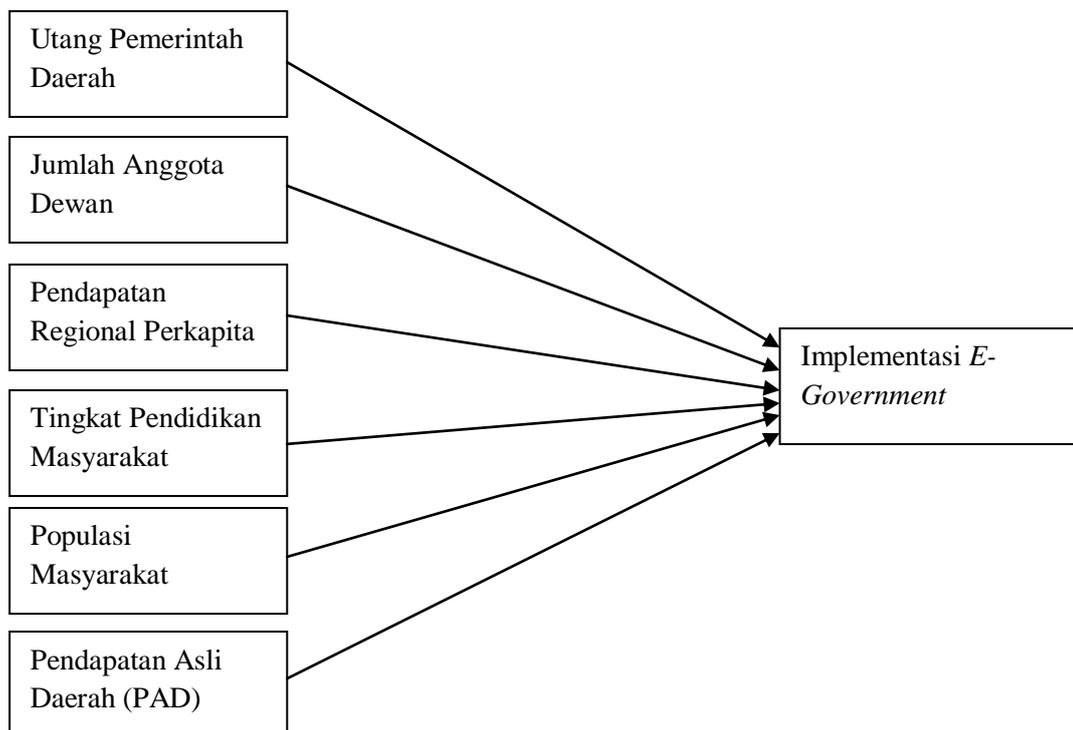
*Sumber : data diolah 2013*

## 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan telaah yang telah dikemukakan, dibuatlah suatu kerangka pemikiran yang dapat membantu dalam memahami penelitian ini. Model penelitian dalam gambar berikut merupakan alur pemikiran dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen :

**Gambar 2.2**

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.3 Hipotesis

Keberhasilan implementasi *E-Government* tidak hanya berasal dari faktor internal dalam pemerintahan. Namun juga berasal dari faktor eksternal, yaitu keadaan sosial budaya masyarakat. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Perez, Bolivar dan Hernandez pada tahun 2008 dengan judul “*e-Government process and incentives for online public financial information*” digunakan sebagai dasar penelitian. Variabel yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap implementasi *e-government* di Pemerintah Daerah Indonesia, yaitu :

### 2.3.1 Pengaruh Utang Pemerintah daerah terhadap implementasi *E-Government*

Dalam konteks pemerintahan, utang/kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran (PSAP 09)

Sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang dituntut untuk memenuhi keinginan prinsipal,

pemerintah Daerah selaku pemilik hutang memberikan insentif yang lebih dominan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. (Gore et al, 2004). Hal ini disebabkan karena pemberi hutang (kreditur) akan menuntut adanya transparansi untuk akuntabilitas melalui implementasi *e-Government*.

Didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luder (1992) dan Fisher et al. (2005), mereka menemukan adanya hubungan positif antara hutang pemerintah dan pengungkapan informasi keuangan publik. Ketika terjadi masalah mengenai utang maka pengungkapan informasi keuangan kepada publik menjadi lebih penting dengan menerbitkan laporan yang mencerminkan situasi keuangan dari pemerintah. Dengan demikian, keberadaan utang bisa mendukung pengungkapan informasi keuangan publik (Wilson dan Howard, 1985). Atas dasar alasan tersebut, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Utang pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *E-Government***

### **2.3.2 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap implementasi e-Government**

Dalam suatu literatur ilmu politik diasumsikan bahwa persaingan partai yang kuat memberikan insentif bagi pemerintah dan mempengaruhi birokrasi (Dye dan Robey, 1980). Studi sebelumnya telah melihat pengaruh dari kompetisi politik terhadap akuntansi sektor publik. (Zimmerman, 1977; Ingram, 1984; Baber dan Sen, 1984; Evans dan Patton, 1987) . Beberapa studi menemukan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kompetisi politik dan

pengungkapan informasi keuangan publik. Sejalan dengan teori Agensi dimana masyarakat sebagai prinsipal dan para anggota dewan sebagai agen, para politikus mengharapkan mendapatkan suara pemilih dari masyarakat lebih banyak, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih.

Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan, diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Sehingga konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi keuangan terhadap publik. Dengan demikian, variabel ini akan diuji. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H2 : Jumlah Anggota Dewan berpengaruh positif pada kemungkinan implementasi e-Government**

### **2.3.3 Pengaruh Pendapatan Regional perkapita terhadap implementasi e-Government**

Dalam jurnal penelitian Perez et al (2008) variabel yang diteliti yaitu mengenai pengaruh variabel independen dana negara/regional terhadap informasi keuangan *online*. Dalam penelitian ini, variabel yang akan digunakan yaitu pendapatan regional perkapita. Pendapatan regional perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah, semakin besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur wilayah tersebut. Secara konseptual PDRB perkapita diperoleh dengan membagi total pendapatan regional dengan jumlah penduduk dalam regional tersebut pada tahun yang sama. (Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Menurut Style dan Tennyson, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi dan cenderung lebih banyak permintaan akan akuntabilitas oleh masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana masyarakat (prinsipal) akan menuntut pemerintah (agen) untuk memenuhi keinginan mereka. Atas dasar hal tersebut, maka variabel ini akan diuji apakah di Indonesia membuktikan hasil yang signifikan juga, sehingga dikembangkan hipotesis :

**H3 : Pendapatan Regional perkapita berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *E-Government***

#### **2.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap implementasi e-Government**

Telah banyak studi yang meneliti pengaruh variabel sosial seperti tingkat pendidikan masyarakat terhadap laporan keuangan. Chan dan Rubin (1987) mempelajari apakah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menimbulkan makin tingginya tuntutan pengungkapan informasi dari pemerintah. Evans dan Yen (2005) mengamati bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh

terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi, sehingga akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan implementasi *E-Government*. Apabila suatu negara memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, maka masyarakat tersebut cenderung tidak terbiasa dalam mengakses internet maupun teknologi informasi lainnya. Dengan kemampuan akses teknologi yang terbatas, tentunya membuat masyarakat tidak menuntut adanya pengungkapan informasi keuangan secara *online*.

Beberapa studi sebelumnya telah mengamati bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan dari tingkat pendidikan terhadap pengungkapan informasi (Chaudhuri et al., 2005). Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap keberhasilan *e-Government* di Indonesia dengan menggunakan angka perguruan tinggi tiap provinsi karena, perguruan tinggi merupakan tingkatan paling tinggi dalam pendidikan dengan umur mahasiswa/mahasiswi yang tentunya sudah terbilang matang dan tentunya kritis terhadap segala fenomena yang terjadi disekitar, khususnya mengenai akuntabilitas pemerintahan diwilayahnya.

Sejalan dengan Teori Agensi, mahasiswa selaku masyarakat (prinsipal) dapat menuntut pemerintah (agen) untuk melaporkan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Selain itu mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan akan teknologi informasi paling tinggi dibanding jenjang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H4: Tingkat Pendidikan Masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-Government**

##### **2.3.5 Pengaruh Populasi Masyarakat terhadap implementasi e-Government**

Beberapa studi telah menemukan bahwa organisasi yang lebih besar cenderung mengadopsi teknologi baru dan lebih sering melakukan inovasi dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Dengan demikian, Moon dan Norris (2005) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk mengadopsi teknologi *E-Government* dibanding pemerintah daerah yang lebih kecil, karena pemerintah daerah yang lebih besar cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik serta meningkatkan pelayanan informasi. Pemerintah daerah yang lebih besar juga memiliki sumber daya anggaran lebih banyak dan departemen pengelola teknologi informasi yang lebih baik.

Evans dan Patton (1987) menemukan bahwa populasi masyarakat merupakan variabel yang signifikan dalam pengungkapan informasi keuangan terhadap publik. Semakin besar populasi, maka akan semakin besar tekanan yang ditujukan terhadap pemerintah akan perwujudan akuntabilitas terhadap publik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana masyarakat sebagai prinsipal akan menuntut pemerintah sebagai agen untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal (masyarakat).

Tuntutan akan akuntabilitas publik tersebut dapat diwujudkan dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode *paper-based* dengan mendistribusikan laporan keuangan kepada *stake holder* yang berkaitan Atas alasan tersebut, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

**H5 : Besar populasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-Government**

### **2.3.6 Pengaruh Tekanan Fiskal terhadap implementasi e-Government**

Ingram (1984) menemukan bahwa semakin besar tekanan fiskal, maka pengungkapan informasi keuangan sektor publik semakin dianggap penting. Dalam penelitian Perez et al. (2008), tekanan fiskal yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak maupun bukan pajak serta penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah , agar dapat disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandi, 2002)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ( Yani, 2002)

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (Halim, 2007)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin besar pertanggungjawaban pemerintah, baik secara internal maupun eksternal. Internal kepada pemerintah pusat dan DPRD. Eksternal kepada masyarakat ,BPK, serta stakeholder lain yang berhak atas informasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen yang memiliki akses langsung terhadap informasi, harus melaporkan informasi tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat (prinsipal). Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

**H6 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *E-Government***

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau suatu yang menjadi titik perhatian penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen). Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *E-Government* di Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel yang diteliti.

##### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi *e-government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi. Dalam penelitian ini digunakan *E-Government Yes or No* yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu Konten Informasi yang disajikan, Karakteristik Website, dan Desain dan Akses. Dari 3 kategori tersebut didalamnya terdapat ukuran-ukuran yang akan diberi nilai 1 apabila ada pada *e-government* suatu pemerintah provinsi, dan 0 apabila tidak ada. Untuk menilai suatu provinsi telah mengimplementasikan e-

government atau belum, setidaknya-tidaknya suatu provinsi harus memenuhi ketiga kategori tersebut. Untuk itu, dibuat kriteria sebagai berikut :

1. Kategori “Desain dan Akses” terpenuhi paling sedikit 50%
2. Kategori “Konten Informasi yang disajikan” , terpenuhi paling sedikit 25%
3. Kategori “Karakteristik Website” terpenuhi paling sedikit 10%

Pemerintah provinsi yang memenuhi 3 kategori tersebut, dianggap telah mengimplementasikan *e-government*, sedangkan pemerintah provinsi yang tidak memenuhi ketiga kategori tersebut dianggap belum mengimplementasikan *e-government*.

### **3.1.2 Variabel Independen**

#### **3.1.2.1 Utang Pemerintah Daerah**

Dalam konteks pemerintahan, utang/kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. (PSAP 09)

Dalam penelitian ini digunakan DSCR sebagai proksi dalam utang pemerintah daerah. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah

dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{F + N + BL}$$

Keterangan:

DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan Perseorangan

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib, yaitu belanja pegawai dan belanja DPRD dalam tahun anggaran yang bersangkutan

F : angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

N : bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

BL : biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan Lain)

(Halim, 2007)

Data yang digunakan adalah APBD pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2011.

### **3.1.2.2 Jumlah Anggota Dewan**

Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. (sumber : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)). Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan, diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Sehingga konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi keuangan terhadap publik.

Pengukuran variabel Jumlah Anggota Dewan ini dengan menghitung jumlah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat Provinsi di Indonesia.

### **3.1.2.3 Pendapatan Regional Perkapita**

Pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan regional perkapita tercermin dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. (Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) . Oleh karena itu, semakin besar pendapatan perkapita maka semakin tinggi kebutuhan

suatu masyarakat akan akuntabilitas pada laporan keuangan.(Ingram, 1984) Dengan demikian, dalam penelitian digunakan PDRB perkapita dari BPS pada tahun 2011.

#### **3.1.2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Tingkat pendidikan perguruan tinggi merupakan tingkatan paling tinggi dalam pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar diperguruan tinggi tertentu. Dengan umur mahasiswa/mahasiswi yang tentunya sudah terbilang matang dan tentunya kritis terhadap segala fenomena yang terjadi disekitar, khususnya mengenai akuntabilitas pemerintahan diwilayahnya. Selain itu secara otomatis mereka memiliki tingkat pengetahuan akan teknologi informasi paling tinggi dibanding jenjang lainnya.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel tingkat pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat penduduk yang mengenyam perguruan tinggi. Dengan demikian, digunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai tolak ukur tingkat pendidikan di Indonesia dalam interval umur Perguruan tinggi dengan kriteria usia 19-24 tahun bersumber dari survey BPS tahun 2011.

#### **3.1.2.5 Populasi Masyarakat**

Besar kecilnya populasi masyarakat di suatu daerah mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi *e-Government*. Semakin besar populasi, maka

akan semakin besar tekanan yang ditujukan terhadap pemerintah akan perwujudan akuntabilitas terhadap publik. (Evans dan Patton, 1987). Sehingga kemungkinan berhasilnya implementasi *e-Government* akan lebih besar. Penelitian ini menggunakan populasi penduduk di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2010 (survey terakhir yang dilakukan BPS).

### **3.1.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam penelitian Perez et al. (2008), tekanan fiskal yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak maupun bukan pajak serta penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Namun, dalam penelitian ini akan digunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, agar dapat disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin besar pertanggungjawaban pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.

PAD yang digunakan adalah PAD di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2011.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran ketertarikan dari hal menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia.

Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 2000). Sampel penelitian diambil secara purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah tingkat provinsi yang memiliki *e-government* yang diharapkan memuat laporan keuangan.
2. *E-government* tidak dalam masa perbaikan atau nonaktif.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, dimana peneliti mendapatkan data dengan melakukan penelusuran dari media internet melalui berbagai *website*, seperti website resmi tiap pemerintah provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk data untuk variabel dependen diperoleh melalui observasi dengan internet terhadap ketersediaan *E-Government* di 33 provinsi di Indonesia.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk data variabel independen dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu berasal dari berbagai *website* di internet, seperti BPS, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri, dan berbagai website pemerintah. Selain itu data-data lainnya didapatkan dari berbagai telaah pustaka untuk membangun dan memperkuat hipotesis.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logistic regression*, dikarenakan variabel dependennya merupakan variabel kualitatif, yaitu apakah pemerintah provinsi telah menerapkan e-government atau belum pada 33 provinsi di Indonesia.

#### **3.5.1 Regresi Logistik**

Regresi logistik merupakan pengembangan lebih lanjut sebagai *multivariate chi square*. Dimana variabel dependennya dalam skala data nominal (dikotomis). Regresi logistik termasuk dalam rumpun regresi sehingga

kedudukannya sama seperti regresi linier yaitu sebagai uji prediksi atau estimasi. Model Regresi logistik (Logit), bukan linier seperti dalam regresi biasa.

Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas, dengan variabel responnya berupa data kualitatif yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik (Hosmer dan Lemeshow, 1989)

### **3.5.2 Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2006) statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, dan *range*. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Statistik deskriptif ini dilakukan untuk meneliti dan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian ini antara lain Utang pemerintah daerah (DSCR), Jumlah Anggota Dewan (DPRD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Populasi Masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.5.3 Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test**

Uji ini disebut juga dengan Uji Kelayakan Model, yaitu untuk menguji kelayakan model regresi. Uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengetahui apakah data empiris telah sesuai dengan model. Apabila nilai statistik Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test lebih besar dari 0,05 maka model tersebut mampu memprediksi nilai datanya, dan bahwa model tersebut sesuai dengan data. Angka chi square yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa model tersebut sudah dapat diterima. (Ghozali, 2006)

Untuk menguji signifikansi dari parameter dalam model digunakan uji *Wald* dan Koefisien Determinasi.

### **3.5.4 Uji Wald**

Uji *Wald* diperoleh dengan cara mengkuadratkan rasio estimasi parameter dengan estimasi standar *error*nya. Uji *Wald* ini digunakan untuk menguji signifikansi tiap parameter. (Hosmer dan Lemeshow, 1989)

### **3.5.5 Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin besar nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* , maka semakin baik kualitas model tersebut menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen.

### **3.5.6 Ketepatan Model**

Ketepatan model menyatakan bahwa seberapa besar nilai ketepatan klasifikasi model terakhir. Semakin besar nilainya maka semakin tepat pengklasifikasian observasi.